

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEREMAJAAN SAWIT RAKYAT (PSR) UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS SAWIT RAKYAT DI KABUPATEN KOTAWARINGI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Muhamad Hafiz Arrofi

NPP. 29.1088

*Asdaf Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 28hafizarrofi@gmail.com

ABSTRACT

The author focuses on the problem of the low quality of palm oil commodities, palm oil commodity prices which are influenced by world prices, environmental issues and the lack of facilities and infrastructure to support smallholder palm oil commodities in Kotawaringi Regency, Central Kalimantan Province. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of community palm oil rejuvenation (PSR) policies to increase the productivity and quality of smallholder palm oil in Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province. **Methods:** This study uses descriptive qualitative methods with an inductive approach and analysis of policy theory by Edwards III in Agustino. Data collection techniques using in-depth interviews (5 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** that the implementation of the community oil palm replanting policy (PSR) still has limited availability of certified seeds so that some residents who already have land ready for replanting must wait for the availability of certified seeds to be able to take part in this PSR program. **Conclusion:** the implementation of the community oil palm rejuvenation policy in the West Kotawaringin Regency has been going well, although there are still some obstacles. Therefore, efforts are needed to be made, namely providing special services or increasing the intensity of socialization of provisions and rules to follow the People's Oil Palm Rejuvenation policy.

Keywords: PSR Implementation, People's Palm Oil Rejuvenation, West Kotawaringin Regency

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan masih rendahnya kualitas komoditas sawit, harga komoditas sawit yang dipengaruhi oleh harga dunia, Isu lingkungan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung komoditas sawit rakyat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis

terhadap teori kebijakan oleh Edwards III dalam Agustino. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (5 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** bahwa implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat (PSR) masih memiliki keterbatasan ketersediaan bibit sertifikasi sehingga sebagian warga yang sudah memiliki lahan siap untuk peremajaan harus menunggu ketersediaan bibit bersertifikat untuk bisa mengikuti program PSR ini. **Kesimpulan:** implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat di kabupaten kotawaringin barat sudah berjalan dengan baik, meskipun masih ada beberapa kendala. Oleh karena itu diperlukan upaya yang harus dilakukan yaitu Menyediakan layanan khusus atau meningkatkan intensitas sosialisasi ketentuan dan aturan untuk mengikuti kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat

Kata Kunci: Implementasi PSR, Peremajaan sawit rakyat, Kabupaten Kotawaringin Barat

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara agraris yang merupakan negara yang sangat bergantung pada sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan). Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Sektor pertanian memiliki andil peran besar dalam mendongkrak sektor sosial, sektor perekonomian dan perdagangan seperti ; kelapa sawit, padi, peternakan, karet dan lain-lain. Secara umum pertambahan luas lahan perkebunan terutama kelapa sawit di Indonesia mengikuti permintaan minyak kelapa sawit (CPO) dari berbagai negara. Peningkatan itu disebabkan oleh semakin banyaknya produk yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit, misalnya margarin, minyak goreng, industri kosmetika, dan berbagai bahan tambahan lemak untuk makanan. Akan tetapi, produktivitas dari perkebunan kelapa sawit masih jauh dari harapan. Berdasarkan data statistik kelapa sawit.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mampu melindungi dan meningkatkan keberdayaan petani kelapa sawit dengan optimal, serta membantu menyelesaikan permasalahan produktivitas dan kualitas sawit yang masih rendah. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengembangan komoditas sawit rakyat seperti masih rendahnya produktivitas komoditas sawit, masih rendahnya kualitas komoditas sawit, harga komoditas sawit yang dipengaruhi oleh harga dunia, Isu lingkungan dan kurangnya sarana dan prasarana pendukung komoditas sawit rakyat.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan program untuk membantu petani sawit untuk memperbaharui kebun dengan bibit kelapa sawit yang unggul dan berkualitas, mengurangi resiko adanya pembukaan lahan ilegal (penggunaan lahan areah perhutanan). Dengan adanya PSR, produktivitas dan kualitas bisa meningkat tanpa adanya pembukaan lahan baru. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan tengah yang wilayah yang pendapatan terbesar daerahnya disumbang oleh sektor perkebunan, yaitu kelapa sawit. Hal ini dikarenakan kondisi geografis, topografi dan jenis tanah sangat mendukung tumbuhnya kelapa sawit.

Sebagai dinas pelaksana tenis di Kabupaten Kotawaringin Barat yang mengawal program PSR Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki tanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, pemantauan serta evaluasi dari program PSR tersebut sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi dari kebijakan peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sawit rakyat yaitu sebelum adanya program ini masih banyak ditemukannya produktivitas kelapa sawit yang tergolong rendah padahal potensi perkebunan kelapa sawit tergolong besar. Faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya disebabkan kondisi pertanaman yang sudah tua dan tidak layak, dan menggunakan bibit sawit yang tidak bersertifikat dan tidak jenis unggulan. Selain itu, birokrasi yang panjang juga menyebabkan kurangnya sarana dan prasarana pendukung komoditas sawit rakyat.

Namun setelah adanya implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat (PSR) tersebut masih juga ditemukan beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan dan ketentuan tentang kebijakan peremajaan sawit rakyat. Selain itu ditemukannya juga keterbatasan bibit bersertifikat sehingga sebagian warga yang sudah memiliki lahan siap untuk peremajaan harus menunggu ketersediaan bibit bersertifikat untuk bisa mengikuti program PSR ini.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan implementasi kebijakan dari peremajaan sawit rakyat (PSR). Penelitian Gatot Pramuhadi, Muhammad Aji Setiawan dan Nenda Fuji Putri Daliesta dengan judul *Studi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Areal Lahan Tanah Mineral dan Lahan Gambut* dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa teknis cara peremajaan kelapa sawit di areal lahan tanah mineral dan lahan gambut.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Piktora Parulian Siregar dimana judul penelitian *Analisis Peremajaan (Replanting) Kebun kelapa Sawit Terhadap Biaya Sosial Ekonomi Petani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal* dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada saat menghadapi peremajaan (replanting) petani melakukan berbagai alternative usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya semasa replanting.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Salma dengan judul *Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Karossa Kecamatan Kabupaten Mamuju Tengah* dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa hasil pertanian kelapa sawit berperan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Karossa.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus yang diteliti oleh penulis yaitu pada bagaimana pelaksana kebijakan PSR agar berjalan optimal dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas sawit Berbeda dari Gatot Pramuhadi, Muhammad Aji Setiawan dan Nenda Fuji Putri Daliesta, 2020, Piktora Parulian Siregar, 2020, dan Salma, 2016. Selain itu implementasi kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) adalah program baru yang diciptakan oleh pemerintah sehingga dalam proses implementasinya pun masih harus menyesuaikan masyarakat dan situasi dan kondisi dari tempat diberlakukannya kebijakan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari kebijakan peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Seksi Produksi Perkebunan dan Kelompok Tani Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Untuk Meningkatkan Produktivitas Dan Kualitas Sawit Rakyat Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan teori dari Edwards III dalam Agustino (2008). Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

3.1. Komunikasi

a. Transmisi

Maksud dari transmisi yaitu bagaimana kebijakan ini ditransmisikan atau dikomunikasikan sehingga dapat di implementasikan dengan baik. Transmisi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan berupa sosialisasi dilakukan terhadap petani sawit, koperasi unit desa, dan kelompok tani yang ada di kecamatan-kecamatan. Bentuk sosialisasi berupa turun langsung ke lapangan, serta pendampingan.

b. Kejelasan

Kejelasan tentang Kebijakan peremajaan sawit rakyat menurut penulis sudah sangat jelas tertuang melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit. kejelasan komunikasi yang diterima dari pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan sudah sangat jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam melaksanakannya.

c. Konsistensi

Konsistensi yang dimaksud adalah sebuah kesadaran secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Konsistensi dapat ditunjukkan melalui komitmen yang dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan kebijakan ini. Implementasi kebijakan akan lebih terlaksana dengan baik apabila ada konsistensi anggaran dalam perencanaannya, apabila ada anggaran yang konsisten dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan ini maka semua komponen akan terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan hasilnya kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik.

3.2 Sumber Daya

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia baik itu kualitasnya maupun kuantitasnya. Sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia yang dilibatkan dalam suatu kegiatan.

Koperasi sebagai pihak yang langsung mengakomodir petani juga harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, pada penelitian ini penulis meneliti pada KUD Karya Tani yang beranggotakan 5 orang pengawas, 3 orang pembina, dan 5 orang pengurus dimana anggota KUD Karya Tani ini adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dan lama di perkebunan kelapa sawit. Pengurus KUD Karya Tani juga dipilih ulang setiap 2 tahun agar tidak terjadi praktik KKN di dalam kepengurusan KUD Karya Tani. Setiap ada *update* mengenai PSR maka Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat akan mengadakan sosialisasi kepada koperasi atau kelompok tani agar bisa diteruskan kepada anggotanya masing-masing.

Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran juga merupakan sumber daya dimana akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Pada pelaksanaan kebijakan ini terutama di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang merupakan objek penelitian penulis, telah menunjukkan kesiapan dalam melaksanakan Kebijakan Peremajaan Sawit rakyat.

3.3 Disposisi

Disposisi adalah kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat para pegawainya telah menunjukkan sikap yang sangat baik dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang belum paham akan kebijakan ini PSR.

Indikator lain dari disposisi yaitu berkenaan dengan insentif. Insentif disini dimaksudkan peruntukannya untuk para pegawai yang terlibat dalam menegakkan kebijakan ini. Tidak mungkin seseorang bekerja tanpa adanya apresiasi. Insentif diberikan kepada pegawai yang telah melakukan suatu program kerja yang diwujudkan dalam suatu kegiatan. Insentif ini juga dapat dijadikan sebagai cara untuk merangsang produktivitas pegawai sehingga mampu memberikan kinerja yang terbaik.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sudah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Aparatur atau staf Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah ditetapkan.

Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam implementasi PSR kepada beberapa bidang yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Konsekuensi paling buruk dari fragmentasi birokrasi adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Fragmentasi di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan dari Implementasi Kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat ini secara umum sudah berjalan dengan baik. Komunikasi yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga setiap ada permasalahan dapat teratasi dengan baik. Dilihat dari sumber daya yang ada, Jumlah pegawai yang ada dalam mendukung kebijakan ini juga sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan merupakan orang yang kompeten di bidangnya, sehingga mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Pengurus Koperasi Unit Desa juga sebagian besar merupakan pengurus lama sehingga tidak perlu waktu lagi untuk beradaptasi. Pengangkatan birokrat juga sudah berjalan dengan baik.

Program PSR ini telah berjalan dengan optimal dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas sawit berbeda dengan temuan Gatot Pramuhadi, Muhammad Aji Setiawan, dan Nenda Fuji Putri Daliesta, 2020. Namun program ini masih memiliki kekurangan dimana masih banyak masyarakat yang kurang paham terhadap aturan dan ketentuan dari kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat.

Selain itu program Peremajaan Sawit Rakyat ini berbeda dari temuan Piktoria Parulian Siregar, 2020. Dimana membahas bagaimana petani mencari penghasilan selama masa pembibitan sedangkan program PSR ini diciptakan untuk mempermudah para petani sawit dalam meningkatkan produktivitas tanamannya. Program Peremajaan Sawit ini juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu program ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan atau digunakan sepenuhnya karena masih adanya masyarakat yang belum paham tentang mekanisme aturan dari implementasi kebijakan program tersebut sehingga belum sepenuhnya siap seperti temuan dari penelitian Salma, 2016.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam implementasi kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat ini yaitu masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan merasa bodo amat terhadap kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu ketersediaan bibit bersertifikat juga sangat terbatas didapatkan. Sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena sebagian warga yang sudah memiliki lahan siap untuk peremajaan harus menunggu agar mendapatkan

ketersediaan bibit bersertifikat sehingga jika masyarakat sudah memilikinya selanjutnya akan bisa mengikuti program PSR ini.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan peremajaan sawit rakyat dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas sawit rakyat di Kabupaten Kotawaringin Barat masih mengalami beberapa hambatan karena beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman dari masyarakat akan peraturan serta kebijakan baru yang telah dibuat oleh pemerintah, selain itu sistem birokrasi pemerintah yang menjadi salah satu penghambat penerbitan bibit sertifikat bagi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Erwards III dalam Agustino.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan implementasi kebijakan Peremajaan Sawit Rakyat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, terimakasih diucapkan kepada Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri beserta seluruh civitas akademika yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dan seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik Dan Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP).
2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
Cresswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fourth Edition)*. Washington DC: Sage Publications.
2016. *Desain Penelitian Pendekatan Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Diterjemahkan oleh: Fawaid dan Pancasari. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung: Alfabeta.

_____.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta

Gatot Pramuhadi, Muhammad Aji Setiawan, Nenda Fuji Putri Daliesta,2020

Studi Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Areal Lahan Tanah Mineral dan Lahan Gambut Pictor Parulian Siregar,2020

Analisis Peremajaan (Replanting) Kebun Kelapa Sawit Terhadap Biaya Sosial Ekonomi Petani Kelapa Sawit Rakyat di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Salma,2020

Peranan Hasil Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Karossa Kecamatan Karossa

